

TERKENDALI

125.2. Terdokumentasi dengan baik

72
Penetapan Status Penggunaan
BMN

PEN

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

05 November 2020

Nomor : W13-US/ 2020 /PL.07/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara pada Satker Pengadilan
Negeri Bantul selain Tanah dan/ atau Bangunan
Dengan Nilai Perolehan ≤ Rp 100.000.000,-

Yth. Kepala badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Cq. Kepala Biro Perlengkapan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 218/KMK.06/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Peneruslimpahan Wewenang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN serta memperlihatkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 39F/BUA/SK/2/2017 tentang perubahan atas Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah/ atau bangunan dengan Nilai Perolehan per unit sampai dengan Rp 100.000.000,- pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana daftar terlampir dengan Total Nilai Perolehan Rp 122.994.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dimaksud, bersama ini kami sertakan kelengkapan data/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Daftar Barang Yang Akan Ditetapkan Status Penggunaannya;
2. Foto/Gambar BMN;
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
4. Laporan Kondisi Barang

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Koordinator Wilayah
2. Arsip.